
INTERELASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

Dedi Efendi¹⁾, Iswantir²⁾

^{1,2)} UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukit Tinggi

Email: dedi.gce@madrasah.id

iswantir@iainbukittinggi.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang hubungan timbal-balik pendidikan terutama pendidikan agama Islam dan politik. Interelasi keduanya sangat erat tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang seiring sejalan dan searah. Politik disatu sisi memiliki kekuasaan untuk menentukan arah pendidikan, pendidikan disisi lain memberikan sumber daya bagi politik. Interelasi keduanya terkadang baik, terkadang buruk tergantung dari ideologi yang dianut oleh penguasa politik saat itu. Kajian politik pendidikan ini sangat kompleks dan menyeluruh.

Kata kunci : Politik, Pendidikan, Ideologi

Abstract

This article examines the reciprocal relationship of education, especially Islamic religious education and politics. The interrelation between the two is very close and cannot be separated, like two sides of a coin that are parallel and in the same direction. Politics on the one hand has the power to determine the direction of education, education on the other hand provides resources for politics. The interrelation between the two is sometimes good, sometimes bad depending on the ideology adopted by the political authorities at that time. The study of educational politics is very complex and comprehensive.

Keywords: Politics, Education, Ideology

PENDAHULUAN

Antara pendidikan dan politik sudah sejak lama terjalin hubungan yang erat. Bahkan semenjak era Plato dan Aristoteles sudah terkenal istilah “*As is the state, so is the school*”, yang artinya seperti halnya negara, begitu jugalah sekolah. Ada juga istilah “*What you want in the state, you must put into the school*”, yang berarti apa yang Anda inginkan dalam negara, Anda harus dimasukkan ke sekolah. (Azra, Azyumardi & Thaha, 2012). Dalam sejarah Islam hubungan antara pendidikan dengan politik yang diterapkan pemerintah yang berkuasa bukanlah suatu hal yang baru, bahkan sudah dapat dilacak sejak masa-masa pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam semacam madrasah. Contoh paling terkenal adalah Madrasah Nizamiyah di Baghdad yang didirikan sekitar tahun 1018 - 1092 oleh Wazir Dinasti Saljuk Nizam al-Mulk. (Junaedi, 2014)

Antara pendidikan dan politik saling terkait satu sama lain. Pendidikan sebagai suatu instrumen dalam suatu negara, sangat bergantung kepada kebijakan yang diambil oleh penguasa negara tersebut. (Sumanti, 2018). Lembaga keagamaan dan kemasyarakatan tidak bisa dipisahkan dari perkembangan situasi sosial politik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sebab konteks sosial politik tersebut ikut memberi warna bagi kelangsungan hidup suatu institusi. Hal yang sama juga berlaku bagi tatanan sosial lainnya, termasuk didalamnya Pendidikan Islam, baik sistem maupun lembaga. Perjalanan sejarah telah memperlihatkan berbagai rangkaian historis yang secara terus menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan pendidikan Islam yang terkadang memihak/menguntungkan dan tidak jarang pula justru merugikan.

M. Sirozi (2010) dalam bukunya Politik Pendidikan yang dikutip Mujib & Yunita, (2018) menerangkan bahwa pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di hampir semua negara. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena saling mempengaruhi. Pengaruh yang dimaksud adalah kebijaksanaan dari pemerintah dalam

memberikan perhatian atau dukungan baik moril maupun materil bagi keberlangsungan pelaksanaan pendidikan pada satu sisi dan peranan lembaga pendidikan dalam menjalankan kegiatan pendidikan pada sisi lain sehingga memberikan pengaruh kepada kemajuan pendidikan di negara tersebut.

Iswantir (2019) menyimpulkan bahwa Pendidikan Islam yang merupakan subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sangat berpengaruh dalam memperbaiki akhlak dan moral bangsa yang sudah sangat mengkhawatirkan termasuk dalam meningkatkan pemahaman keagamaan umat Islam yang ada di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam yang tumbuh di berbagai daerah di Indonesia yang awalnya tumbuh berkembang oleh dan ditengah masyarakat tentu membutuhkan payung perlindungan untuk terus berkembang. Semakin maju pendidikan Islam, akan berdampak pula kepada kemajuan pendidikan di negara Indonesia.

Sebagai gambaran bagaimana tingkat kemajuan pendidikan di Indonesia setelah memasuki usia kemerdekaan yang ke-77 ini, tentu patut direnungkan bagaimana tingkat kemajuan pendidikan di negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Ranking Indonesia dalam PISA tahun 2018 yang “hanya” mampu mendudukkan Indonesia pada posisi 75 dari 81 negara dengan skor 379.(Fahlevi, 2022) Tentu banyak faktor yang bisa dianalisa apa penyebab hasilnya seperti itu. Diantara faktor itu boleh jadi adalah faktor politik yang melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Interelasi pendidikan, terutama pendidikan Islam, dan politik di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak dahulu. Kalau dibatasi sejak masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi sekarang ini, pasang surut interelasi ini dapat dipelajari dari penelitian-penelitian sejarah sosial pendidikan. Hoddin (2020) mengemukakan bahwa ada empat buah potret relasi politik dan pendidikan Islam di Indonesia yakni: 1) pada masa pra-kemerdekaan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Belanda dan Jepang bersifat diskriminatif, 2) ada upaya pembenahan terhadap kebijakan pendidikan Islam oleh pemerintah Orde Lama, tetapi situasi politik tidak kondusif, seperti perseteruan ideologis antar-kelompok nasionalis, sekuler, komunis dan Islam mengakibatkan terganggunya implementasi kebijakan tersebut, 3) pemerintah Orde Baru melalui TAP MPRS Nomor 27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966 menetapkan bahwa ”agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam *Nation and Character Building* namun terhalang oleh adanya kebijakan sentralistik dalam implementasi kurikulum pendidikan, 4) pemerintah era reformasi melalui UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 12 ayat 1 (a) memberikan angin segar bagi pendidikan Islam walaupun masih menimbulkan pro dan kontra, tapi dengan keluarnya Permendikbud No. 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menjadikan UU Nomor 20 tahun 2003 menjadi lebih bermakna dan aplikatif.

Sifat diskriminatif politik terhadap pendidikan pada zaman penjajahan Belanda juga diungkapkan oleh Mufid (2016) yang mengkaji penelitian Karel A. Steenbrink tentang sistem pendidikan kolonial Belanda. Pada masa itu, tidak semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan. Ada perbedaan antara rakyat pribumi murni, warga keturunan dan orang berkulit putih (Eropa). Pendidikan agama Islam juga disudutkan pada pondok-pondok pesantren yang dikesankan kumuh, kumal, kuno dan kusam (4-ku). Hanya mengajarkan pengetahuan agama yang mendasar, bersifat hafalan dan tidak mengembangkan nalar yang tinggi. Untuk menjawab kesan 4-ku itu, pada masa ini bermunculanlah sekolah-sekolah dan madrasah yang modern pada masa itu seperti sekolah Adabiyah di Padang, madrasah Diniyah di Padang Panjang, sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta dan sekolah/madrasah lain di berbagai daerah. Di sekolah/madrasah ini, diajarkan materi keagamaan dan umum.

Pada makalah ini, penulis mendeskripsikan bagaimana interelasi Pendidikan Agama Islam dan politik di Indonesia. Dengan kajian dalam makalah ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran bagaimana hubungan keduanya terjalin sehingga saling memahami untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan bersama. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,

berjalan seiring seirama dan searah. Bila tidak, maka yang terjadi justru saling mencurigai, saling menegasikan dan akhirnya tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Panggung sejarah telah menampilkan sejumlah negara yang maju pendidikannya maju pula negaranya, juga sejumlah negara yang tidak tentu arah pendidikannya maka negaranya juga tidak jelas mengarah kemana. Menjadi negara yang bukan mundur, bukan pula maju. Istilahnya, menjadi negara "bukan-bukan". Istilah yang pernah dikemukakan oleh Gus Dur. (Ridwan, 2018) Istilah ini penulis munculkan untuk menyebut suatu negara yang belum bisa disebut negara yang gagal didik, tapi mengarah kepada kegagalan pendidikan.

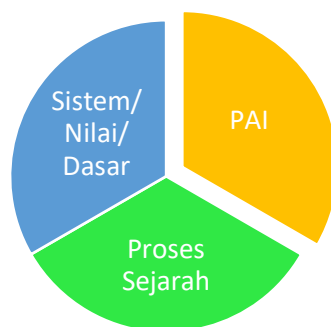
METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Peneliti memasuki lapangan dengan melakukan wawancara pendahuluan kepada informan dilanjutkan dengan membuat forum diskusi dan Peneliti melakukan analisis data kualitatif serta interpretasi dengan mengacu kepada model analisis induktif terkait Proses Mengajar Dalam Al-Quran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pembahasan awal, penulis ingin menjelaskan terlebih dulu tentang konsep Pendidikan Agama Islam (PAI). Di tengah masyarakat sering muncul ketidakjelasan pemahaman antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Ada yang menyamakan, ada juga yang mencampuradukkan kedua istilah tersebut. Iswantir (2019) berdasarkan pendapat para ahli, menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pengembangan potensi peserta didik melalui pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan dan pengawasan untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan nilai Islam untuk mewujudkan kesempurnaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Pendidikan Islam juga merupakan suatu sistem yang diharapkan dengannya tercapai kehidupan yang sesuai dengan idiologi Islam. Sedangkan pendidikan agama Islam (PAI) adalah sebuah mata pelajaran yang mengajarkan agama Islam di sekolah dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan agama Islam dari siswa-siswa yang beragama Islam.

Menurut Muhaimin (2006), pendidikan agama Islam adalah subkomponen dari pendidikan Islam yang terdiri dari: 1) pendidikan menurut Islam, mencakup dasar, nilai dan sistem pendidikan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. 2) pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yaitu usaha mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilai agar menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang. 3) pendidikan dalam Islam, yakni praktik dan proses pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam perjalanan sejarah umat Islam. (Iswantir, 2019)



Gambar 1. Komponen Pendidikan Islam

Sebagai subkomponen pendidikan Islam, PAI memegang peranan yang sangat fundamental karena dengannya seseorang memiliki pandangan dan sikap hidup yang berlandaskan

nilai-nilai Islam. Namun tentu saja tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada seperangkat sistem, nilai dan dasar pendidikan serta praktik dan proses panjang dalam perjalanan kehidupan.

Sedangkan politik menurut para ahli bisa kita rangkai dalam penjelasan berikut. Miriam Budiardjo dalam bukunya *Dasar-dasar Ilmu Politik* yang dikutip oleh Rifai (2011) menghimpun pendapat para ahli, diantaranya Roger F. Soltau dalam *Introduction to Politics* mengatakan “Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lainnya”. J. Barentz dalam *Ilmu Politika* mengatakan “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, juga mempelajari negara-negara itu”. Ossip K. Flechtheim dalam *Fundamentals of Political Science* mengatakan “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat mempengaruhi negara”. Flechtheim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik mempengaruhi satu sama lain dan bergantung satu sama lain. Joyce Mitchell dalam *Political of Analysis and Public Policy* mengatakan “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya”. Sedangkan Harold Laswell dalam *Who gets What, When and How*, mengatakan “Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata politik diartikan sebagai: pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan yaitu mengenai system pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat serta kebijakan, cara bertindak di dalam menghadapi masalah tertentu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang diakses pada laman <https://kbbi.web.id> interelasi bermakna hubungan satu sama lain. Istilah ini merupakan salah satu dari empat prinsip Geografi yakni prinsip distribusi (penyebaran), prinsip deskripsi (penjelasan), prinsip interelasi (keterkaitan) dan prinsip korologi (gabungan prinsip distribusi, deskripsi dan interelasi). Prinsip interelasi digunakan untuk menganalisis keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya di dalam suatu ruang, antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, atau alam dengan manusia. (Maghfiroh, 2022)

Menurut penulis, prinsip ini boleh juga digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara pendidikan, terutama pendidikan agama Islam dengan politik di dalam suatu ruang besar yang namanya Indonesia. Antara politik dan pendidikan saling terkait dalam bentuk sebab akibat, fenomena atau gejala. Paulo Freire (1921-1997), tokoh pendidikan dari Brazil pernah menegaskan bahwa pendidikan tidak pernah lepas dari kekuasaan. Segala kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Politik dan kekuasaan bisa menjadi sarana bagi rakyat untuk memperoleh pendidikan yang baik. Sehingga dikatakan bahwa negara yang politik pendidikannya buruk, performa pendidikannya pun buruk. Begitu juga sebaliknya, negara yang politik pendidikannya baik, maka performa pendidikannya pun baik. (Tamin AR, et.al 2018)

Pendidikan yang diterapkan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kebijakan politik pemerintahan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masa Orde Baru terkesan mengabaikan pendidikan Islam. Hal ini menyebabkan lembaga pendidikan Islam memiliki banyak kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan itu diantaranya rendahnya sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan dana. Karenanya, umat Islam belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya; dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif; dan lembaga pendidikan Islam kurang diminati oleh masyarakat. Kelemahan-kelemahan ini akhirnya dapat diatasi berkat perjuangan dan kesabaran umat dan tokoh-tokoh Islam, perhatian pemerintah semakin lama semakin besar sehingga melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang membawa pendidikan Islam dan lembaga

pendidikan Islam semakin berperan dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum di Indonesia.(Shabir U., 2016)

Sudah jamak bahwa sejak lama pendidikan di negeri ini menjadi alat politik, pengumpul dan penjaga kekuatan bagi penguasa. Setiap pergantian presiden, berganti menteri, dapat dipastikan berganti pula kurikulum yang menjadi acuan para pendidik dalam mengajar di sekolah/madrasah. Segala sesuatu yang diajarkan di sekolah/madrasah bila memberikan efek buruk bagi pemegang kekuasaan, tidak boleh diajarkan di sekolah. Contohnya, pada masa Orde Baru sejarah yang diajarkan di sekolah/madrasah berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya karena sejarah yang sebenarnya merugikan pemegang kuasa di negeri ini. (Rifai, 2011) Pemerintah orde baru melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun, intervensi pemerintah melalui penyajian subjek tertentu dalam kurikulum (seperti mata pelajaran/kuliah pancasila); indoktrinasi atau penataran (seperti penataran P4), adalah bukti nyata bahwa pendidikan adalah salah satu sarana kepentingan politik penguasa.

Pada era orde baru dikenal sebuah kebijakan yang cukup berpengaruh dan masih akrab ditelinga umat Islam sampai saat ini apalagi para pengelola pendidikan Islam, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri) tahun 1975, No. 06/1975, 037/U/1975 dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan Islam pada madrasah. Serta sebuah undang-undang tentang SISDIKNAS yaitu UU No. 2 Tahun 1989. Akhirnya pada era reformasi setelah kejayaan orde baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi 1998 dan munculnya berbagai tuntutan perubahan disegala bidang kehidupan, termasuk pendidikan Islam, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang memberi pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Dari beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa politik memberikan pengaruh kepada pendidikan. Politik sebagai suatu seni yang memungkinkan sesuatu atau untuk mewujudkan sesuatu. Maka, ketika niat, cara atau tujuan berpolitik itu baik, politik bukanlah sesuatu yang kotor, justru mulia, baik, natural dan alamiah sebagai bentuk kemanusiaan dari manusia baik sebagai individu maupun masyarakat yang memiliki keinginan, harapan, impian tujuan atau cita-cita yang lebih baik. Apalagi tujuan politik tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti menjadi bupati/wali kota, gubernur, anggota parlemen, menteri, bahkan presiden yang menyejahterakan rakyat, menegakkan keadilan dan supremasi hukum, tentulah politik ini mulia. Politik itu sebenarnya adalah kemanusiaan yang tak boleh dihindari oleh seluruh umat manusia. Sebab melalui politik atau menjadi politisilah kita ikut berperan untuk kepentingan rakyat dengan mencerdaskan rakyat banyak, pemerataan pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang memudahkan rakyat bisa mengakses pendidikan secara baik. Melalui politiklah kita bisa bergerak lebih jauh, lebih cepat ketimbang kita sebagai pengkritik sebuah kebijakan saja.(Rifai, 2011)

Adapun hubungan pendidikan terhadap politik, terlihat dari tokoh-tokoh politik dan pergerakan sepanjang sejarah sejak dulu hingga sekarang tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka tidak menyebutkan nama satu per satu, adalah produk dari pendidikan. Pendidikan telah menyuplai orang-orang hebat yang menjadi mesin perpolitikan sejak dari tingkat daerah, nasional hingga mencapai tingkat regional dan internasional. Pendidikan juga memiliki daya dan ruang kekuasaan, memiliki kekuatan untuk melakukan kritik atas kekuasaan yang menyeleweng, seperti yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa seperti angkatan 1928, 1945, 1966, 1970-an, 1980-an sampai 1998. Pendidikan tidak bisa dipandang dengan batasan hanya transformasi ilmu pengetahuan, dan budaya semata tapi juga transformasi serta penguatan kekuasaan sehingga sering terdengar istilah pengkhianatan intelektual karena sang intelektual itu hanya memberikan intelektualismenya untuk kekuasaan. Sementara itu kita juga mendengar istilah intelektual moral yang mengabdikan intelektualismenya untuk menjaga moral dan kebenaran.(Rifai, 2011)

Karena itu, hubungan antara politik dan pendidikan termasuk pendidikan agama Islam didalamnya, melahirkan dua kajian yakni 1) politik pendidikan, dan 2) pendidikan politik. Politik pendidikan mengkaji bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh penguasa, sementara pendidikan politik mengkaji proposi ide, diskursus dan transformasi kepada generasi mendatang tentang dunia politik yang berkaitan dengan kekuasaan, penataan dan pengelolaan kebijakan publik dan sebagainya yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan untuk kepentingan umum.

Politik dan pendidikan sebenarnya tak bisa dipisahkan. Filsuf besar seperti Michael Foucault juga mengatakan bahwa tidak mungkin memisahkan keberadaan pengetahuan dengan meninggalkan kekuasaan. Sebaliknya, tak mungkin memisahkan kekuasaan bisa berjalan tanpa pengetahuan. Kekuasaan bekerja di dalam proses pembentukan pengetahuan yang merupakan sebuah bentuk kebudayaan. Tidak mungkin menjalankan pendidikan, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak secara nasional, dilakukan dengan melepaskan diri secara total dari campur tangan kekuasaan. Kapasitas seorang pendidik terbatas, tidak bisa mengatur persoalan ekonomi, politik dan budaya dari peserta didik dan orang tuanya secara menyeluruh dan efektif. Tidak mungkin hidup seseorang hanya soal belajar dan mengajar, soal buku pelajaran, ujian dan melepaskan diri dari persoalan sosial-politik disekitarnya. Sebaliknya tidak mungkin sebuah kekuasaan dari dulu hingga sekarang yang bisa meninggalkan dunia pendidikan sama sekali atau menekan pendidikan dengan tiada batasnya karena akhirnya akan mendapatkan perlawanan sengit bahkan mematikan serta menggulingkan kekuasaan tersebut. (Rifai, 2011)

HAR Tilaar (2003) yang dikutip oleh Rifai (2011) juga memberikan gambaran kaitan antara pendidikan dan kekuasaan itu dengan mengemukakan ungkapan "guru ratu wong atuwo karo". Artinya, di dalam masyarakat tradisional Indonesia dikenal tiga sumber kekuasaan yang mengayomi masyarakatnya, yaitu guru, ratu atau pemerintah dan orang-orang yang dituakan sebagai pemimpin informal dalam masyarakat. Guru berperan menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah dan madrasah. Ratu atau raja yang dalam masyarakat modern disebut pemerintah, yang mempunyai sumber kekuasaan untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat melalui struktur birokrasi yang bermacam-macam. Kemudian orang-orang yang dituakan sebagai pemimpin-pemimpin informal seperti kepala adat, pemimpin organisasi di tengah masyarakat.

Dalam kajian Kartini Kartono dalam *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional (1997)* yang dikutip juga oleh Rifai (2011), politik pendidikan di setiap negara berbeda-beda tergantung ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Di negara totaliter, kebebasan individu dibatasi, pemberian pendidikan dengan pola penyeragaman, ketat dan keras. Sistem pendidikannya hanya ada satu yaitu berdasarkan satu macam filsafat pendidikan. Guru-guru bersikap otokratis, mutlak, memerintah dan mengajar dengan tangan besi. Hal tersebut terjadi jika pendidik diharuskan meneruskan perintah dan kecenderungan kekuasaan politik bangsanya yang otoriter. Maka tujuan pendidikan di negara totaliter adalah membentuk dan membuat manusianya sebagai alat kekuasaan. Di negara komunis dan fasis, tidak mungkin sekolah bisa membebaskan diri dari pengaruh politik negara. Pendidikan adalah senjata strategis yang ampuh untuk menguasai manusia, yaitu seragam persis seperti yang dikehendaki pemerintahannya. Pendidikan mutlak ada di tangan negara yang memegang kendali penuh. Sedangkan rakyat secara etis harus melaksanakan tanpa menolak setiap tugas dan perintah negara.

Negara oligarkis, yang diperintah oleh beberapa penguasa yang terpilih dan sifatnya sangat berkuasa, mengembangkan pendidikan yang monolinear. Sistem pendidikannya hanya memerhatikan pendidikan dari anak-anak kaum bangsawan. Anak rakyat pada umumnya dibiarkan tidak terdidik dan dalam keadaan terbelakang. Negara kapitalis adalah negara yang dikuasai oleh sekelompok kapitalis atau pemilik modal. Kondisi sekolah, akademi dan perguruan tinggi pada umumnya mewah dan sempurna. Tetapi, yang bisa memasuki lembaga pendidikan

hanya anak-anak orang kaya saja. Sebab, biaya untuk sekolah sangat tinggi, tidak mungkin terbayar oleh rakyat biasa. Karena tingginya ongkos sekolah tersebut, dikemudian hari para intelektual lulusan sekolah dan universitas cenderung mengeksploitasi negara dan bangsanya demi pulang modal dan demi penumpukan kekayaan pribadi.

Dalam negara demokratis, konsep kenegaraannya jelas ada pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif namun kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat. Tujuan pendidikannya dalam membimbing dan mendidik anak diartikan sebagai mendidik manusia dan anak manusia supaya bisa berkembang dengan bebas dan maksimal untuk kemudian sanggup melaksanakan aktualisasi diri supaya bisa hidup sejahtera. Melalui pendidikan, anak didik memecahkan masalah hidupnya, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya perubahan dan kemajuan di masa depan. Lewat perencanaan sistematis, pendidikan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya.

Bagaimana dengan pendidikan di Indonesia? Yang jelas ideologinya bukan oligarkis, bukan otokratis, bukan komunis atau fasis, bukan pula demokratis ala barat, melainkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak sama seperti demokrasi barat yang liberal dan kapitalis. Demokrasi yang tidak sama dengan yang di negara mana pun. Bukan ke barat, bukan ke timur. Itulah yang diistilahkan secara satire oleh Gus Dur, demokrasi bukan-bukan. Karena ideologinya ideologi bukan-bukan, maka pendidikannya juga menjadi pendidikan bukan-bukan. Tidak bisa dikatakan rendah seratus persen atau maju seratus persen. Jika diplesetkan lagi, pendidikan kita kadang maju kadang mundur, maju kena mundur kena atau pendidikan yang kadang-kadang. Pendidikan nasional kita terkadang fasis, terkadang otokratis, terkadang komunis, terkadang kapitalis dan terkadang demokratis. Itulah uniknya Indonesia. Kita bersyukur hidup di negara Indonesia yang damai dan tentram ini.

Secara geografi, negara kita yang terletak di perlintasan dua benua dan dua samudera, bangsa kita sudah biasa beradaptasi dengan segala model dan corak pemikiran yang datang. Kemampuan bangsa kita berakulturasi dan berasimilasi sudah terbukti selama ini membuat bangsa kita masih tetap berdiri tegak. Kelebihan kita dalam akulturasi dan asimilasi itu jika dikelola dengan baik akan menjadikan bangsa kita penentu dalam pergaulan dunia. Disamping itu, kebiasaan merantau pada sebagian suku di Indonesia, menjadikan anak-anak bangsa ini menjadi hebat dimana mereka berada. Mungkin karena negara kita yang dikelilingi laut dan garis pantai yang sangat panjang, banyak ditumbuhi pohon kelapa, sehingga mempengaruhi sikap mental yang tangguh. Di Indonesia yang banyak tumbuh pohon singkong, banyak dikonsumsi anak-anak Indonesia sejak kecil, telah menumbuhkan sikap mental yang bisa tumbuh dan berkembang dimana saja.

KESIMPULAN

Dari penjelasan dalam bagian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa politik dan pendidikan tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang seiring sejalan dan searah. Keduanya saling mempengaruhi, kadang baik kadang buruk. Bila salah satunya baik, maka baik dampaknya kepada yang lain. Sebaliknya bila salah satunya buruk, maka buruk dampaknya kepada yang lain.

Kajian tentang politik dan pendidikan sangat kompleks dan menyeluruh. Didalamnya terkait dengan birokrasi, anggaran, kebijakan kurikulum, guru, sarana-prasarana, pemerataan, peningkatan kualitas pendidikan, indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan hal-hal lainnya.

REFERENSI

Azra, Azyumardi & Thaha, I. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi Dalam Modernisasi Menuju*

- Millinium Baru* (Cet. 1). Kerjasama UIN Jakarta Press [dan] Kencana.
- Fahlevi, F. (2022). *Peringkat Indonesia rendah berdasarkan hasil survei PISA, pembelajaran matematika harus komprehensif*. Tribunnews.com.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/13/peringkat-indonesia-rendah-berdasarkan-hasil-survei-pisa-pembelajaran-matematika-harus-komprehensif>
- Hoddin, M. S. (2020). Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>
- Iswantir. (2019). *Pendidikan Islam Sejarah , Peran dan Kontribusi Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Januari 20). AURA.
- Junaedi, M. (2014). Madrasah: dari Nizamiyah hingga Pesisiran Jawa. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 95–125. <https://doi.org/10.21580/nw.2014.8.1.572>
- Maghfiroh, N. L. (2022). *Prinsip-Prinsip Geografi dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-Hari*. <https://akupintar.id>. Prinsip-Prinsip Geografi dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-Hari
- Mufid, A. I. dan S. (2016). Mengungkap politik kekuasaan dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia melalui kajian historis. *Tarbiyah : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1–14.
- Mujib, A., & Yunita, Y. (2018). Pendidikan Islam dan Politik. *Ri'ayah*, 03(01, Januari-Juni), 1–11.
- Ridwan, N. K. (2018). *Negara Bukan-bukan: Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila* (Y. Arifin (ed.); I, April 2). IRCiSod.
- Rifai, M. (2011). *Politik Pendidikan Nasional* (M. Sandra (ed.); I). Ar-Ruzz Media.
- Shabir U., M. (2016). Kebijakan Pemerintah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 16(2), 166–177. <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a4>
- Sumanti, S. T. (2018). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 1(1), 44–62.
- Tamin AR, Z. D. (2018). *Politik Pendidikan (Konsep dan Praktik Kebijakan Pendidikan di Indonesia)* (E. F. Rusydiyah (ed.)). Dwiputra Pustaka Jaya.